

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era perkembangan bisnis dan keuangan dunia, eksistensi manfaat laporan keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh pihak internal saja melainkan juga pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan dibuat oleh pihak manajemen perusahaan sebagai hasil pertanggungjawaban dan kinerja perusahaan selama satu periode. Perusahaan dituntut untuk lebih transparan memberi laporan keuangan perusahaan. Sedangkan Menurut Suhartono (2015) bentuk laporan pertanggungjawaban pada laporan keuangan tersebut ialah berupa ikhtisar data keuangan perusahaan. Kemudian Hidayat (2014) menyatakan pengungkapan laporan keuangan yang baik adalah mengungkapkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan rinci, jelas, dapat dipahami, relevan, tepat waktu serta dapat dipahami.

Akan tetapi masih terdapat permasalahan dan fenomena yang terjadi pada perusahaan mengenai pengungkapan laporan keuangannya. Seperti fenomena pertama yang terjadi mengenai kasus pada PT Kimia Farma, Seperti diketahui, kantor akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa menemukan kesalahan pencatatan laba bersih Kimia Farma tahun buku 2001. Pada audit per 31 Desember 2001, dipublikasikan laba bersih perseroan sebesar Rp 132 Miliar. Belakangan, Kementerian BUMN, selaku pemegang saham mayoritas mencium adanya ketidakberesan ini, dan meminta akuntan publik yang sama menyajikan kembali (restated) laporan keuangan 2001. Ternyata, laba bersih tahun lalu besarnya hanya Rp 99 Miliar, dan koreksi ini telah disepakati lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kimia Farma. (www.tempo.co.id, 02 juli 2018).

Selanjutnya pada fenomena kedua terjadi pada perusahaan BUMN yaitu PLN dimana laporan keuangannya patut dipertanyakan. Perusahaan BUMN yang beroperasi di pasar dengan ciri-ciri penguasaan atas sumber daya dan pengelolaan harga pokok produksi produknya serta penetapan harga pada konsumen akhir, justru mengalami kerugian inilah yang menjadi pertanyaan besar soal laporan keuangan tersebut. Disinilah peran pengungkapan kepada para prinsipal sangat dibutuhkan untuk menjelaskan mengenai apa yang telah terjadi pada perusahaan, dan kondisi yang seperti apa yang sedang terjadi pada perusahaan. (www.suara.com, 02 juli 2018)

Pada fenomena ketiga pada salah satu situs berita online mengenai masalah keterbukaan informasi pkpu PT davomas abadi tbk yang dipertanyakan, dimana pemegang saham mayoritas PT davomas abadi tbk mencurigai pkpu direkayasa karena tidak ada klarifikasi, rincian atau penjelasan mengenai bagaimana utang kepada pt aneka surya agro timbul. (www.bisnis.com, 02 juli 2018)

Pengungkapan pada laporan keuangan yang telah dijelaskan oleh teori agensi mendasari hubungan keagenan antara agen/manajemen untuk memberikan informasi cukup kepada prinsipal/pemegang saham. Informasi-informasi material mengenai peristiwa bisa di ungkapkan di luar informasi laporan keuangan sebagai pemahaman yang cukup mengenai kondisi perusahaan dalam satu periode. Teori agensi juga mengimplikasikan terjadinya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dengan pemilik yang dalam hal ini merupakan pemegang saham/investor, dimana manajemen memiliki informasi lebih banyak dan akurat daripada pemegang saham akan cenderung ingin menyampaikan kondisi perusahaan yang baik, walaupun terkadang realitanya kurang mendukung. Oleh sebab itu informasi yang transparan sangat dibutuhkan

pengguna informasi terutama pemegang saham sebagai pemilik, dimana informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusannya. Menurut teori keagenan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menerapkan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Hidayat (2014) mengungkapkan *corporate governance* adalah suatu mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor untuk mengendalikan dan mengawasi tindakan manajemen.

Demikian juga dengan Wulandari (2015) menyebutkan beberapa tujuan dari pengungkapan yaitu :

1. Menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan,
2. Menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuranyang bermanfaat bagi item-item tersebut,
3. Untuk menyediakan informasi guna membantu investor dan kreditor dalam menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui,
4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun,
5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masamendatang, dan
6. Untuk membantu investor dalam menetapkan *return* dan investasinya.

Pengungkapan yang disampaikan dalam laporan keuangan oleh perusahaan terdiri dari pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela (Fitriana & Prastiwi, 2014). Menurut Murni (2016) pengungkapan wajib merupakan pengungkapan

minimum yang diharuskan oleh peraturan berlaku yang ditetapkan oleh FSAB atau Dewan Standar Akuntansi/IAI sebagaimana telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Untuk perusahaan yang *go publik* pengungkapan yang wajib telah ditetapkan oleh Badan Pengawas PasarModal (BAPEPAM). Peraturan yang mengatur pengungkapan wajib di indonesia dikeluarkan oleh pemerintah melalui surat keputusan ketua BAPEPAM No Kep-7/PM/1995 dan sudah diperbaharui sampai sekarang yakni peraturan BAPEPAM No Kep-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten. Komponen pengungkapan wajib berdasarkan FSAB/IAI dalam (Soewardjono, 2014;575) terdiri dari Statemen keuangan (*financial statements*), Catatan atas statemen keuangan (*notes to financial statements*), Informasi pelengkap (*supplementary information*).

Sedangkan pengungkapan sukarela menurut Indriyani dan Chariri (2014) adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar peraturan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu perusahaan bebas mengungkapkan informasi apa saja yang ingin diungkapkan untuk membantu pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaan dan pengambilan keputusan, informasi tersebut juga dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dengan pihak eksternal.

Pada masa kini investor merasa pengungkapan wajib saja dirasa kurang memadai sebagai bahan pembuatan keputusan. Diperlukan informasi yang memadai dan terpercaya untuk menunjang kebutuhan investor dalam menentukan strategi untuk berinvestasi, sehingga pengungkapan sukarela menjadi informasi tambahan yang perlu diungkapkan ke pasar modal. Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dapat menarik

perhatian lebih banyak para analisis dengan meningkatkan akurasi ekspektasi pasar dan menurunkan ketidaksimetrisan informasi pasar dengan pengungkapan yang lebih luas tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela pada perusahaan adalah ukuran dewan komisaris. Semakin besar ukuran dewan komisaris, biasanya luas pengungkapan sukarelanya akan semakin banyak. Menurut teori agen menjelaskan dewan komisaris mempunyai tugas dan tanggungjawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Salah satunya dalam hal kebijakan penyusunan pengungkapan sukarela guna untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi. Dewan komisaris disini menjadi perwakilan dari pihak prinsipal dalam hal pengawasan.

Seperti halnya yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya oleh Poluan & Nugroho (2016) dan Fitrianto & Hudiwinarsih (2017) mengatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang besar cenderung akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga dewan komisaris dapat menekan kebijakan manajemen untuk melakukan tingkat pengungkapan sukarela lebih luas. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryaman (2009) dan Murni (2016) bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

Dengan meningkatnya komite audit maka luas pengungkapan sukarela akan semakin tinggi. Dalam teori agensi keberadaan komite audit akan meningkatkan kepercayaan prinsipal dan masyarakat terhadap kelayakan dan obyektivitas

laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap adanya kendali internal yang lebih baik juga untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam melakukan pengungkapan sukarela. Komite audit memiliki peran untuk meminimalisir adanya asimetri informasi. Informasi sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan akan dijamin kebenarannya karena telah diperiksa oleh komite audit. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rouf (2010) dan Siagan & Ghozali (2012) hasilnya tersebut konsisten bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang tinggi berarti perusahaan dapat meningkatkan kualitas dan integritas laporan keuangan, juga merupakan salah satu upaya mengurangi kecurangan pengungkapan laporan keuangan sehingga keberadaan komite audit dapat meningkatkan sistem pengawasan terhadap perilaku manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan dan dapat meningkatkan kinerja manajemen dalam hal luasnya pengungkapan sukarela. Akan tetapi beda halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fitrianto & Hudiwinarsih (2017) dan Priwinandi dkk. (2015) mengungkapkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Semakin tinggi rasio komisaris independen berarti menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dimana semakin kuat komisaris independen suatu perusahaan maka tingkat pengungkapan sukarelanya akan semakin luas. Seperti halnya komisaris independen merupakan pihak netral yang dapat menyelesaikan masalah keagenan yang terjadi antara pihak prinsipal dengan pihak agen. Komisaris independen

bertindak profesional dan berintegritas untuk memastikan terhadap dewan direksi bahwa telah memperhatikan dalam penyediaan laporan keuangan. Dengan banyaknya komisaris independen maka proses pengawasan semakin berkualitas karena menuntut adanya transparansi sehingga mampu meningkatkan luas pengungkapan sukarela. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi dkk (2015) dan Poluan & Nugroho (2015) mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Bahwa semakin tinggi tingkat rasio komisaris independen akan semakin luas pula informasi sosial yang diungkapkan. Proses pengawasan yang dilakukan komisaris independen makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitrianto & Hudiwinarsih (2017) dan siagan & Ghazali (2012) mengatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten membuat penelitian mengenai pengungkapan sukarela ini menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fitrianto dan Hudiwinarsih (2017). Maksud dari penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali variabel *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan ditambah dengan menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan *Leverage* yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitrianto dan Hudiwinarsih (2017), yaitu untuk tahun rentang

periode penelitian 2014-2016, penambahan pada item variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, dan *Leverage*. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di BEI.

Penulis memilih perusahaan *property dan real estate* karena bisnis ini memberikan peluang dan kesempatan yang cukup terbuka untuk berkembang. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain: (1) Pengadaan rumah selalu kurang dibandingkan kebutuhan rumah masyarakat, tingkat suku bunga kredit perumahan rakyat relatif rendah dan cenderung tidak stabil. Selain itu, bisnis ini didukung oleh perkembangan suatu daerah dan pertumbuhan ekonomi makro (www.properti.kompas.com), (2) Terjadinya krisis di belahan benua Eropa dan Amerika tampaknya tidak berimbas pada perkembangan bisnis properti di Indonesia. Tingginya *demand* atau permintaan atas ketersediaan bangunan masih jauh lebih banyak dibanding *supply* atau penawaran yang disediakan oleh perusahaan (www.properti.kompas.com), (3) Di Indonesia, pertumbuhan di sektor properti terus didorong oleh pesatnya pertumbuhan kelas menengah, yang pada tahun 2014 telah meningkat 37% dari tahun 2004 menjadi sebesar 56,7%. Meski aktivitasnya sempat menurun karena segala isu politik dan ekonomi lainnya, jumlah populasi Indonesia yang besar tidak mungkin dilewatkan para investor sebagai peluang yang menguntungkan (www.lamudi.co.id).

Alasan lain yang mendukung peneliti lebih memilih perusahaan *property dan real estate* sebagai objek penelitian adalah dalam penelitian-penelitian sebelumnya objek penelitian yang cenderung digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah sektor Manufaktur, Industri Barang Konsumsi, dan *Food and*

Beverage. Sehingga peneliti lebih tertarik untuk memilih perusahaan *property* dan *real estate*.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh berbagai karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela sehingga membuka kesempatan untuk dilakukannya penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh antara *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan ditambah dengan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan *Leverage* dengan luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan *property and real estate* di indonesia.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang pengungkapan laporan tahunan perusahaan serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya tentang karakteristik perusahaan dan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.
3. Bagi pihak universitas, menambah literatur atau referensi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.
4. Bagi pihak BAPEPAM dan BEI, penelitian ini dapat memberi masukan guna membantu dalam meningkatkan pengawasan pasar modal dan mengembangkan penetapan kebijakan di masa datang.